

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Manajemen Pendidikan

a. Pengertian Manajemen Pendidikan

Menurut G. Terry, manajemen didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau proses yang saling terkait dan tidak terpisahkan, yang dikenal dengan akronim POAC: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi ini membentuk kerangka kerja esensial dalam menjalankan suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan, guna mencapai target yang telah ditetapkan dengan efektivitas dan efisiensi.

Terry (Terry & Rue, 2014) menegaskan bahwa suksesnya manajemen tidak hanya bersandar pada rencana yang matang, tetapi juga pada kapabilitas organisasi untuk memobilisasi sumber daya dan melakukan kontrol yang berkelanjutan. Dalam ranah manajemen pendidikan, kerangka POAC ini berfungsi sebagai panduan sistematis bagi sekolah untuk mengelola program-programnya, memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan memiliki sasaran, prosedur, dan hasil yang akuntabel.

Manajemen diperlukan setiap individu untuk mencapai tujuan tertentu yang disepakati dalam hal pekerjaan pada suatu organisasi. Seperti halnya lembaga pendidikan. Menurut Winardi “manajemen berhubungan dengan usaha pencapaian sesuatu hal yang spesifik, yang dinyatakan sebagai suatu sasaran”. Sehingga manajemen merupakan alat yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Manajemen pendidikan adalah pengelolaan sumber daya pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di tingkat sekolah, manajemen melampaui tugas administratif; ia merupakan strategi kunci untuk mengatur proses belajar-mengajar, mengembangkan potensi siswa, serta menanamkan nilai dan karakter.

Berdasarkan pandangan Terry dan Rue (2014), manajemen diartikan sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsep ini berfungsi sebagai fondasi penting bagi sekolah untuk mengelola program pendidikan secara terstruktur dan berkelanjutan. Inti dari manajemen pendidikan adalah mengoptimalkan semua potensi lembaga pendidikan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan lingkungan belajar, demi mendukung tujuan pendidikan.

Menurut Mulyasa (2022), manajemen pendidikan yang berhasil akan menghasilkan lingkungan sekolah yang suportif dan kondusif, meningkatkan keterlibatan semua pihak di sekolah, serta menjamin bahwa setiap program memiliki arah dan dampak yang terukur. Melalui manajemen yang baik, fokus sekolah tidak hanya terbatas pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan kepribadian siswa secara holistik.

Implementasi manajemen pendidikan memerlukan integrasi yang erat antara kebijakan, perencanaan program, dan operasional kegiatan di sekolah. Kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai manajer pendidikan yang bertugas menyelaraskan berbagai elemen sekolah agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pemikiran Robbins dan Coulter (2016), keberhasilan manajemen sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam memotivasi, memimpin, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Dengan

demikian, manajemen pendidikan merupakan faktor penentu yang krusial untuk memastikan bahwa semua program pendidikan, seperti pembiasaan religius, terlaksana dengan baik dan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter siswa.

b. Tujuan Manajemen Pendidikan

Adapun tujuan manajemen pendidikan menurut Nanang Fattah (2010), menyitir pendapat Shrode dan Voich tujuan manajemen adalah produktivitas dan kepuasan seperti peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kesempatan kerja pada pembangunan daerah/nasional serta tanggung jawab sosial. Tujuan tersebut ditentukan berdasarkan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman. Serta merupakan upaya mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.

Tujuan utama dari manajemen adalah mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Di dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan khusus yang menjadi fokus utama dalam aktivitas manajerial.

Berikut adalah beberapa tujuan umum dari manajemen:

- 1) Mencapai Efisiensi: Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya organisasi secara optimal. Tujuan ini menekankan pada pengurangan pemborosan, biaya, waktu, dan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan. Manajer berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi atau operasional tanpa mengorbankan kualitas.
- 2) Mencapai Efektivitas: Efektivitas berarti mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling tepat dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Ini melibatkan kemampuan untuk menetapkan tujuan

yang jelas, mengembangkan strategi yang efektif, dan mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan tersebut.

- 3) **Peningkatan Kualitas:** Manajemen bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan proses produksi, inovasi produk, dan penerapan standar kualitas yang tinggi.
- 4) **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuan ini mencakup pengembangan karyawan, penciptaan lingkungan kerja yang positif, serta meningkatkan keterampilan dan produktivitas anggota tim.
- 5) **Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan:** Lingkungan bisnis terus berubah, baik dari segi teknologi, regulasi, maupun preferensi pasar. Manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan ini dengan cepat dan menyesuaikan strategi organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar.
- 6) **Pengembangan Inovasi:** Inovasi merupakan kunci untuk pertumbuhan jangka panjang dan keunggulan kompetitif. Manajemen berusaha untuk menciptakan budaya inovasi di dalam organisasi, mendorong ide-ide baru, dan mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang.
- 7) **Mempromosikan Keberlanjutan:** Keberlanjutan lingkungan dan sosial menjadi semakin penting dalam praktek manajemen modern. Tujuan ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, pengurangan dampak lingkungan, serta kontribusi positif terhadap masyarakat dan komunitas tempat organisasi beroperasi.

c. **Fungsi Manajemen Pendidikan**

Fungsi manajemen dalam pendidikan diungkapkan oleh beberapa ahli. Namun penulis mengambil pendapat dari George R. Terry yang lebih

sederhana dan dapat mewakili semua pendapat. Terdapat empat fungsi manajemen yang diungkapkan dalam bukunya *Principles of Management* yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC, diantaranya:

1) Perencanaan

Menurut Baharuddin (2010) dan Makin, perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran (*objectives*) apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan atau sasaran dan siapa yang akan melaksanakan tugas- tugasnya.

Pada suatu organisasi, lembaga, atau kegiatan langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian barulah dirumuskan cara-cara mencapai tujuan itu dan pelaku kerjanya. Sesudah menetapkan tujuan dan sebelum merumuskan langkah atau cara hendaknya terlebih dahulu melakukan analisis untuk mengetahui apa yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mulyono juga menjelaskan dalam melakukan suatu perencanaan, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, poin- poin tersebut adalah sebagai berikut:

a) Langkah-langkah perencanaan

- (1) Memiliki sasaran/tujuan organisasi
- (2) Sasaran/tujuan ditetapkan untuk setiap sub-unit organisasi- divisi, departemen, dan sebagainya
- (3) Program ditentukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang sistematis (tentunya dengan mempertimbangkan kelayakan program tersebut)

b) Proses Perencanaan

- (1) Merumuskan tujuan yang jelas/operasional
 - (2) Mengidentifikasi dan menganalisis data terkait dengan masalah
 - (3) Mencari dan menganalisis alternatif pemecahan masalah
 - (4) Mengomparasikan alternatif yang ditemukan, antara alternatif yang tepat guna, berhasil guna, dan praktis
 - (5) Mengambil keputusan
 - (6) Menyusun rencana kegiatan
- c) Aspek Perencanaan
- (1) Senantiasa berorientasi pada masa depan
 - (2) Disajikan untuk mencapai tujuan
 - (3) Sebagai usaha menjabarkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang
 - (4) Kegiatan yang mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan
 - (5) Merupakan kegiatan mempersiapkan sejumlah alternatif
- d) Rencana yang baik
- (1) Asas pencapaian tujuan
 - (2) Asas dukungan data yang akurat
 - (3) Asas menyeluruh (komprehensif dan integrated)
 - (4) Asas praktis
- e) Manfaat perencanaan
- (1) Hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan.
 - (2) Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak.
 - (3) Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi.

- (4) Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir.
- (5) Pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif dan efisien.
- (6) Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin.
- (7) Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin.
- (8) Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan organisasi.
- (9) Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam organisasi.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas - tugas tertentu untuk masing - masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu: “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.”

Terdapat beberapa manfaat dari fungsi sebuah pengorganisasian diantaranya : Mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok; pembagian tugas sesuai dengan kemampuan anggota sebuah organisasi; setiap individu mengetahui apa yang harus dilakukan; mempermudah pengawasan; memaksimalkan

manfaat spesialisasi; efisiensi anggaran; hubungan antar individu semakin harmonis.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu dalam fungsi pengorganisasian diantaranya : Kekuasaan dan tanggung jawab, disiplin, keterpaduan arah, keteraturan, inisiatif, keadilan, *teamwork*.

3) Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa: “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Tujuan dari fungsi pelaksanaan ini yaitu: sebagai alat motivasi, mengintegrasikan upaya, menyediakan stabilitas, dan penggunaan sumber daya dengan efisien.

4) Pengawasan

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa controlling, yaitu: “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”. Pengawasan menurut Husaini Usman (2006) ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula atau belum. Sarwoto dalam Baharuddin (2010) memberi batasan pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Berdasarkan dua pengertian pengawasan tersebut dapat dipahami bahwasannya dalam aktivitas pengawasan seorang manajer atau pemimpin mengawasi jalannya kegiatan dan kinerja bawahan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan rencana semula atau belum dalam upaya mencapai tujuan yang selanjutnya akan diadakan tindak lanjut dari hasil pengawasan itu. Dalam pengawasan juga dilakukan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengukur, menilai, dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang sudah digariskan dalam *planning*, apakah sudah tepat dan sesuai atau belum, ataukah mungkin justru menyimpang.

Adanya kontrol dan evaluasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu manajemen. Jika keberadaan kontrol dan evaluasi ini lemah dan longgar, maka akan dapat mengakibatkan kegagalan dalam menemukan kelemahan dan gagal mengoreksi aktivitas yang menyimpang. Jika hasil dari kontrol dan evaluasi tidak memuaskan maka harus diatasi dengan mengubah rencana, mengadakan reorganisasi, atau mengubah fungsi kepemimpinan.

2. Konsep Supervisi Manajerial

Supervisi manajerial merupakan salah satu bentuk supervisi pendidikan yang berfokus pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Supervisi ini tidak menitikberatkan pada proses pembelajaran di kelas, melainkan pada kinerja manajerial kepala sekolah dan unsur pendukungnya dalam mengelola satuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Selain itu, supervisi manajerial merupakan salah satu bentuk pembinaan profesional yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk meningkatkan efektivitas manajemen sekolah secara menyeluruh. Supervisi ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga

mencakup pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan. Dalam konteks pendidikan, supervisi manajerial menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen sekolah berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (2017), supervisi manajerial adalah kegiatan pembinaan yang menekankan pada pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, supervisi manajerial bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sekolah secara keseluruhan.

Mulyasa (2013) menyebutkan, supervisi manajerial adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah agar seluruh komponen dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Supervisi manajerial tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga memberikan pembinaan serta bimbingan yang bersifat konstruktif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sahertian (2010) menyatakan bahwa supervisi manajerial merupakan proses bantuan profesional yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pimpinan sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan secara efektif.

Purwanto (2004:76), "Supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif." Pernyataan ini menegaskan bahwa supervisi bukan sekadar pengawasan yang bersifat mencari kesalahan, melainkan bantuan profesional yang bersifat demokratis dan konstruktif. Lebih lanjut, Purwanto (2004:82) menambahkan bahwa "Supervisi tidak hanya terbatas pada kegiatan

mengajar, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran proses pendidikan." Dengan demikian, pengelolaan sarana prasarana menjadi bagian integral dari supervisi manajerial karena fasilitas yang memadai merupakan prasyarat terciptanya proses belajar yang berkualitas.

Supervisi manajerial bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sekolah agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan supervisi manajerial berkaitan erat dengan peningkatan kinerja kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsi manajemen. Menurut Purwanto (2014), tujuan supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan sekolah sehingga seluruh kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan terarah. Selain itu, supervisi manajerial bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan sekolah serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Kaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, supervisi manajerial bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pelaksanaan supervisi manajerial harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain objektivitas, kesinambungan, demokratis, keterbukaan, dan pembinaan.

Menurut Sahertian (2010), prinsip objektivitas menuntut supervisor untuk melakukan supervisi berdasarkan data dan fakta yang akurat. Prinsip kesinambungan mengharuskan supervisi dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Prinsip demokratis menekankan adanya kerja sama dan komunikasi yang harmonis antara supervisor dan pihak yang disupervisi.

Selain itu, Purwanto (2014) menegaskan bahwa supervisi manajerial harus berorientasi pada pembinaan, bukan pada pencarian kesalahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, supervisi manajerial dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, termasuk dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan. Supervisi manajerial memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan dalam pengelolaan sekolah. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pembinaan.

Menurut Mulyasa (2013), fungsi perencanaan dalam supervisi manajerial bertujuan membantu kepala sekolah menyusun program pengelolaan sekolah secara sistematis. Fungsi pengorganisasian memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan dengan jelas. Fungsi pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, fungsi pembinaan diarahkan pada pemberian bimbingan dan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan mutu pengelolaan sekolah secara berkelanjutan (Purwanto, 2014). Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, fungsi supervisi manajerial sangat penting untuk memastikan fasilitas sekolah dimanfaatkan secara optimal.

Ruang lingkup supervisi manajerial mencakup seluruh aspek pengelolaan pendidikan di sekolah. Menurut Sagala (2011), supervisi manajerial meliputi pengelolaan kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, serta administrasi sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu fokus utama supervisi manajerial karena fasilitas pendidikan merupakan faktor pendukung utama keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi manajerial diarahkan pada perencanaan kebutuhan sarana, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana pendidikan yang sudah tidak layak pakai.

Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan supervisi manajerial, termasuk dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah berperan sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengawas seluruh kegiatan pengelolaan sekolah. Menurut Mulyasa (2013), kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang mampu melaksanakan supervisi manajerial secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui supervisi manajerial, kepala sekolah dapat mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta merumuskan solusi yang tepat.

Supervisi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan mutu pengelolaan fasilitas sekolah secara berkelanjutan. Supervisi manajerial dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Dalam supervisi manajerial, kepala sekolah melakukan proses identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, menyusun program supervisi, menetapkan standar dan kriteria fasilitas pendidikan, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia.

Sejalan dengan pandangan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (2017), supervisi manajerial merupakan kegiatan pembinaan yang menekankan pada pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan sekolah, sehingga tahapan perencanaan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan supervisi. Tanpa perencanaan yang matang, supervisi manajerial tidak akan mampu memberikan arah yang jelas terhadap peningkatan mutu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Supervisi manajerial pada tahap perencanaan merupakan wujud nyata penerapan fungsi planning sebagaimana dikemukakan oleh G. R. Terry, karena bertujuan menetapkan arah, strategi, dan langkah kerja yang sistematis dalam pengelolaan fasilitas sekolah.

Konsep supervisi manajerial erat kaitannya dengan empat fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry (1972:5), yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC). Terry menyatakan bahwa, "Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources." Artinya, supervisi manajerial harus mencakup perencanaan kebutuhan sarana prasarana, pengorganisasian struktur pengelolaan, penggerakan guru dan staf untuk merawat fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sarana agar sesuai dengan tujuan pendidikan.

Supervisi manajerial pada hakikatnya merupakan implementasi konkret dari Grand Theory Manajemen yang dikemukakan oleh G. R. Terry dalam konteks pendidikan. Teori manajemen Terry yang menekankan empat fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau penggerakan (actuating), serta pengawasan (controlling), menyediakan kerangka konseptual yang sistematis untuk memahami dan menganalisis praktik supervisi manajerial di sekolah. Seluruh tahapan dalam supervisi manajerial, mulai dari perencanaan program, pengaturan sumber daya, pengarahan pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut, sejatinya merepresentasikan proses manajerial sebagaimana digariskan oleh Terry.

Perspektif manajemen pendidikan, supervisi manajerial tidak dapat dipandang sebagai aktivitas teknis semata atau sekadar kewajiban administratif kepala sekolah dan pengawas. Supervisi manajerial merupakan proses manajemen yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Sekolah sebagai organisasi formal membutuhkan sistem pengelolaan yang terstruktur agar seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sarana dan

prasarana pendidikan, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada fungsi perencanaan (planning), supervisi manajerial berperan sebagai instrumen untuk menentukan arah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara strategis. Kepala sekolah melalui supervisi manajerial melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan kondisi nyata sekolah, tuntutan kurikulum, serta perkembangan kebutuhan peserta didik. Proses ini mencakup penentuan prioritas pengadaan, penyusunan rencana pemeliharaan, serta penetapan standar sarana dan prasarana yang selaras dengan tujuan pendidikan. Perencanaan yang dilakukan dalam supervisi manajerial menjadi fondasi utama bagi efektivitas fungsi manajemen selanjutnya, karena tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan fasilitas sekolah cenderung bersifat reaktif dan tidak berorientasi pada mutu.

Selanjutnya, fungsi pengorganisasian (organizing) dalam supervisi manajerial berkaitan dengan pengaturan peran, tugas, dan tanggung jawab seluruh unsur sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun struktur kerja yang jelas, menetapkan tim pengelola sarana dan prasarana, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif antar pihak terkait. Supervisi manajerial pada tahap ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang terintegrasi, sehingga setiap sumber daya manusia di sekolah memahami perannya masing-masing dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Pengorganisasian yang efektif mencegah terjadinya tumpang tindih tugas, kelalaian tanggung jawab, dan pemborosan sumber daya. Dalam kerangka teori G. R. Terry, pengorganisasian menjadi jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, supervisi manajerial yang kuat pada aspek pengorganisasian akan memperkuat kohesi organisasi

sekolah dan mendukung terciptanya tata kelola sarana dan prasarana yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Fungsi pelaksanaan atau penggerakan (actuating) dalam supervisi manajerial menempatkan kepala sekolah pada peran kepemimpinan yang aktif dan dinamis. Pada tahap ini, supervisi manajerial tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa program dan rencana kerja dijalankan, tetapi juga untuk menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja secara optimal. Kepala sekolah melalui supervisi manajerial memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta dukungan kepada guru dan tenaga kependidikan agar terlibat secara aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Konteks pengelolaan fasilitas pendidikan, fungsi actuating menjadi sangat penting karena keberhasilan pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh perilaku dan kesadaran pengguna. Supervisi manajerial yang berorientasi pada penggerakan mendorong terciptanya budaya sekolah yang peduli terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Kepala sekolah bertindak sebagai teladan dalam penggunaan sarana yang bertanggung jawab, sekaligus sebagai fasilitator yang menguatkan komitmen warga sekolah untuk menjaga keberlanjutan fasilitas pendidikan.

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang secara langsung terimplementasi dalam supervisi manajerial. Dalam kerangka teori G. R. Terry, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Supervisi manajerial memungkinkan kepala sekolah melakukan monitoring terhadap kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana, mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sekolah.

Pengawasan dalam supervisi manajerial tidak bersifat menghukum, melainkan korektif dan pembinaan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut yang terencana. Dengan demikian, supervisi manajerial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga sekolah mampu menjaga konsistensi pencapaian tujuan pendidikan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, supervisi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kerangka manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut membentuk satu kesatuan proses yang saling melengkapi dan menentukan keberhasilan pengelolaan sekolah. Supervisi manajerial yang hanya berfokus pada pengawasan tanpa perencanaan dan pembinaan akan kehilangan esensi manajerialnya. Sebaliknya, supervisi yang terintegrasi dalam kerangka POAC akan menghasilkan pengelolaan fasilitas pendidikan yang sistematis dan berorientasi pada mutu.

Penerapan teori manajemen G. R. Terry dalam supervisi manajerial mendukung terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari kemampuan sekolah menyediakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sedangkan efisiensi tercermin dari optimalisasi penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga. Supervisi manajerial membantu kepala sekolah memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan fasilitas memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Supervisi manajerial yang berlandaskan Grand Theory Manajemen G. R. Terry memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sarana dan prasarana yang terkelola dengan baik menciptakan

lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Guru memiliki dukungan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, sementara peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Supervisi manajerial bukan sekadar konsep teoritis, melainkan praktik manajemen pendidikan yang integral dan strategis. Supervisi manajerial mengaktualisasikan teori manajemen klasik G. R. Terry dalam konteks sekolah modern, dengan menyesuaikan prinsip-prinsip POAC terhadap kebutuhan dan tantangan pendidikan. Konsistensi penerapan kerangka ini akan memperkuat peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan yang profesional, visioner, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Manullang (2017) menegaskan bahwa "Supervisi manajerial harus dilakukan dengan pendekatan kesejawatan, yaitu hubungan yang bersifat kolaboratif antara pengawas dan kepala sekolah untuk meningkatkan efektivitas manajemen." Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang harmonis dan mendorong partisipasi aktif semua pihak. Sementara itu, Mulyadi (2020) menyatakan bahwa "Pengawas sekolah berperan sebagai konsultan yang membantu kepala sekolah dalam mengelola seluruh aspek manajemen, termasuk sarana prasarana, agar tercapai efisiensi dan akuntabilitas." Dengan demikian, supervisi manajerial bukan hanya pengawasan, tetapi juga pendampingan dan pembinaan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Secara praktis, supervisi manajerial berperan sebagai mekanisme kontrol dan pembinaan yang mendorong terciptanya budaya kepedulian terhadap sarana prasarana. Kepala sekolah dan pengawas tidak hanya memantau kondisi fisik fasilitas, tetapi juga membina guru dan tenaga kependidikan agar memiliki kesadaran untuk menjaga dan memanfaatkan

sarana secara optimal. Supervisi yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data akan menghasilkan pengelolaan sarana prasarana yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, konsep supervisi manajerial bukan sekadar teori, tetapi sebuah praktik manajemen yang mengintegrasikan fungsi pengawasan dengan pembinaan profesional untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Sarana dan prasarana

a. Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mendukung proses belajar mengajar. Dalam kajian pendidikan, istilah sarana dan prasarana sering digunakan berpasangan untuk merujuk pada keseluruhan fasilitas pendidikan yang memungkinkan proses belajar-mengajar berlangsung efektif, efisien, teratur, dan berkelanjutan. Sarana pendidikan dipahami sebagai perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam pembelajaran (misalnya buku, media, alat praktik, komputer, dan proyektor), sehingga kehadirannya menentukan kualitas aktivitas belajar di kelas.

Sementara itu, prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang pembelajaran mencakup lahan, gedung/ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, jalur akses, instalasi daya dan layanan (listrik, air, telepon), serta ruang-ruang administratif.

Kerangka konseptual ini ditegaskan dalam literatur administrasi pendidikan dan dirumuskan pula dalam standar/regulasi

nasional: satuan pendidikan wajib memiliki sarana (perabot, peralatan, media, buku/sumber belajar, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain) serta prasarana (lahan, ruang-ruang fungsional, fasilitas olahraga/ibadah, serta instalasi daya dan jasa) sebagai prasyarat pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pembedaan fungsi sarana prasarana bukan sekadar semantik, melainkan menjadi dasar perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana berarti segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam terlaksananya suatu proses. Definisi ini menegaskan bahwa sarana berfungsi langsung dalam kegiatan pembelajaran, sementara prasarana berfungsi sebagai pendukung.

Wahyu Sri Ambar Arum (2023) menjelaskan bahwa Sarana pendidikan adalah semua peralatan atau fasilitas yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ibrahim Bafadal dan E. Mulyasa juga menegaskan bahwa "Sarana secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran. Prasarana secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran" (Bafadal & Mulyasa, 2002).

Soetjipto dan Rafli Kosasi menambahkan bahwa "Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar-mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung" (Soetjipto & Kosasi, 2004). Dengan demikian, sarana dan prasarana

bukan hanya pelengkap, tetapi prasyarat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Kerangka regulasi juga memperkuat definisi ini. Permendiknas No.24 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah". Sementara PP No.19 Tahun 2005 Pasal 42 menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media, buku, bahan habis pakai, serta prasarana berupa lahan, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya. Regulasi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana adalah bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah.

Persamaan dan perbedaan keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut: keduanya sama-sama berfungsi menunjang keberhasilan proses pendidikan, tetapi sarana digunakan langsung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana bersifat penunjang lingkungan dan struktur. Contoh sarana meliputi buku, media pembelajaran, komputer, dan alat praktik, sedangkan prasarana mencakup gedung, ruang kelas, instalasi listrik, dan jaringan.

Secara praktis, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Sekolah dengan fasilitas lengkap memungkinkan guru menerapkan metode aktif seperti eksperimen dan pembelajaran berbasis proyek, sementara kekurangan fasilitas dapat menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi siswa. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi peningkatan mutu pendidikan.

Benang merah dari hal tersebut adalah sarana dan prasarana pendidikan merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Definisi dari kamus, teori akademik, dan regulasi semuanya menekankan bahwa keduanya merupakan fondasi bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. Jenis dan Klasifikasi sarana dan Prasarana

Jenis dan klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek penting dalam manajemen fasilitas sekolah. Pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi ini membantu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset agar sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Secara umum, klasifikasi sarana dan prasarana dapat ditinjau dari fungsi, sifat material dan mobilitas. Pertama, berdasarkan fungsi, sarana adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Contoh sarana meliputi alat pelajaran, alat peraga, media pembelajaran, buku, komputer, dan perangkat teknologi. Gunawan (1996) menyatakan, "Fasilitas pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, atau sifatnya... prasarana berfungsi tidak langsung... sedangkan sarana berfungsi langsung". Sarana berperan langsung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga keberadaannya sangat menentukan kualitas proses belajar.

Sebaliknya, prasarana adalah fasilitas yang berfungsi tidak langsung, seperti lahan, gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan instalasi daya. Prasarana menciptakan lingkungan yang mendukung kelancaran proses pendidikan. Wahyu Sri Ambar Arum menegaskan bahwa "Prasarana

pendidikan adalah alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan" (Arum, 2024).

Kedua, berdasarkan sifat material, fasilitas pendidikan dibedakan menjadi fisik (material) dan nonfisik. Fasilitas fisik mencakup benda berwujud seperti meja, kursi, papan tulis, komputer, dan alat laboratorium. Fasilitas nonfisik mencakup layanan pendukung seperti jaringan internet, sistem informasi, dan kebijakan tata tertib sekolah. Kalsifikasi ini penting karena pengelolaan fasilitas fisik memerlukan strategi pemeliharaan yang berbeda dibandingkan dengan fasilitas nonfisik.

Ketiga, beberapa literatur juga mengklasifikasikan sarana dan prasarana berdasarkan mobilitas, yaitu sarana bergerak dan sarana tidak bergerak. Sarana bergerak adalah fasilitas yang dapat dipindahkan, seperti kursi, meja, dan alat peraga. Sarana tidak bergerak adalah fasilitas permanen seperti gedung dan instalasi listrik. Permendiknas No.24 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah".

Selain itu, regulasi PP No.19 Tahun 2005 Pasal 42 menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media, buku, bahan habis pakai, serta prasarana berupa lahan, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, kantin, fasilitas olahraga dan ibadah, serta instalasi daya dan layanan. Regulasi ini menunjukkan bahwa klasifikasi sarana dan prasarana bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga standar yang harus dipenuhi oleh sekolah.

Secara praktis, pemahaman tentang jenis dan klasifikasi sarana dan prasarana membantu sekolah dalam menentukan prioritas pengadaan. Misalnya, sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis

teknologi harus memprioritaskan sarana berupa perangkat TIK dan jaringan internet. Sebaliknya, sekolah yang fokus pada pembelajaran berbasis eksperimen harus memastikan ketersediaan laboratorium dan alat praktik. Hal ini mengacu bahwa klasifikasi sarana dan prasarana akan berperan strategis dalam mendukung mutu pendidikan.

Lebih lanjut dapat disimpulkan, jenis dan klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu fungsi, sifat material, dan mobilitas. Pemahaman yang komprehensif terhadap klasifikasi ini memungkinkan pengelolaan fasilitas yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

4. Hubungan supervisi manajerial dengan pengelolaan Sarana Prasarana

Supervisi manajerial pada satuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tugas kepala sekolah dan pengawas dalam memastikan seluruh sumber daya, terutama sarana dan prasarana dapat berfungsi optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara konseptual, fondasi hubungan ini dapat dijelaskan melalui empat fungsi manajemen menurut G.R. Terry, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC). Terry menegaskan bahwa *“management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources,”* sehingga aktivitas pengelolaan fasilitas sekolah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajerial yang sistematis dan berorientasi tujuan. Pernyataan ini menempatkan pemanfaatan manusia dan sumber daya lain—termasuk perlengkapan pendidikan—sebagai inti manajemen sekolah yang efektif.

Sisi lain supervisi dalam konteks pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan personel sekolah bekerja secara efektif. Ngilim Purwanto (2004) menjelaskan bahwa

supervisi pendidikan adalah bantuan profesional yang demokratis untuk memperbaiki proses belajar-mengajar secara total bukan sekadar inspeksi mencari kesalahan melainkan kemitraan untuk mengembangkan mutu pembelajaran dan layanan pendidikan.

Kerangka ini, fokus supervisi tidak hanya pada praktik mengajar guru, tetapi juga pada kondisi lingkungan belajar yang meliputi ketersediaan, kelayakan, dan pendayagunaan fasilitas pendidikan. Dengan kata lain, saat supervisor mengupayakan perbaikan pembelajaran, ia secara simultan menegakkan standar dan praktik pengelolaan sarana prasarana yang menopang proses tersebut.

Pertama Perencanaan supervisi manajerial yang baik dimulai dari analisis kebutuhan fasilitas berdasarkan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan pemerintah. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa satuan pendidikan wajib memenuhi kriteria minimum sarana (perabot, peralatan pendidikan, buku/sumber belajar, media, TIK, bahan habis pakai) dan kriteria minimum prasarana (lahan, ruang kelas, ruang pimpinan/guru, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, olahraga, bermain, dan ruang pendukung lainnya).

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa kriteria rinci tercantum pada lampiran peraturan, sehingga kepala sekolah/pengawas memiliki acuan normatif untuk menyusun rencana pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas secara bertahap. Perencanaan yang berangkat dari standar nasional memastikan konsistensi mutu dan pemerataan akses terhadap sarana prasarana esensial bagi proses pembelajaran.

Praktik manajemen perlengkapan sekolah yang dikemukakan Bafadal (2018), menekankan bahwa pengelolaan peralatan dan perlengkapan harus dilakukan secara efektif dan efisien, dari perencanaan kebutuhan hingga pengawasan penggunaan agar benar-benar sesuai peruntukannya. Perencanaan yang baik mencakup inventarisasi, proyeksi kebutuhan, prioritas anggaran,

serta penjadwalan pengadaan dan pemeliharaan untuk memastikan kesiapan sarana setiap saat. Dengan demikian, dimensi *planning* dalam supervisi manajerial berfungsi sebagai “jembatan” antara tujuan pendidikan (*learning outcomes*) dan kesiapan fasilitas (*learning environment*), sehingga keputusan pengelolaan tidak bersifat *ad hoc*, melainkan selaras dengan visi-misi sekolah dan standar nasional

Kedua hubungan antara supervisi manajerial dan pengelolaan sarana prasarana semakin nyata pada tahap pengorganisasian. Merujuk pada penjelasan Terry, *organizing* adalah koordinasi sumber daya manusia dan material dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara sistematis. Di sekolah, pengorganisasian berarti pembentukan tim sarpras (misalnya wakasek sarpras, petugas inventaris, teknisi/laboran, dan perwakilan guru), penetapan alur tugas, dan mekanisme koordinasi lintas unit (kurikulum, kesiswaan, keuangan, komite) agar pengelolaan fasilitas berjalan terpadu.

Ketika supervisor (kepala sekolah/pengawas) merancang pengorganisasian yang jelas, maka fungsi-fungsi seperti inventarisasi, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan dapat berjalan secara terstruktur dan akuntabel. Literatur manajemen sarpras menegaskan bahwa pendayagunaan sarana dan prasarana adalah proses kerja sama agar semua perlengkapan pendidikan digunakan secara efektif.

Rohiat dan Wahyu Sri Ambar Arum (2022) menyebut manajemen sarana prasarana sebagai kegiatan mengatur, mempersiapkan, dan memanfaatkan perlengkapan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, sementara Tim Pakar Manajemen UM menekankan kerja sama untuk pendayagunaan sarpras sekolah secara efisien. Ini berarti struktur organisasi dan koordinasi yang dibangun oleh supervisor harus mendukung sinergi antar peran dan meminimalkan *bottleneck* (misalnya tumpang tindih tugas, keterlambatan pengadaan, atau lemahnya komunikasi antar unit)

Pada Tahap Ketiga yaitu penggerakan (*actuating*), hubungan supervisi manajerial dengan pengelolaan sarana prasarana tampak melalui kegiatan pembinaan dan motivasi kepada guru dan staf agar menjaga, merawat, dan menggunakan fasilitas sesuai SOP. Dalam definisi Terry, *actuating* merupakan upaya memotivasi dan mengarahkan orang untuk bekerja mencapai tujuan; di sekolah, ini mencakup sosialisasi prosedur pemakaian alat, pelatihan teknis (misal penggunaan TIK/laboratorium), penegakan etos merawat (*care culture*), dan pembiasaan pelaporan kerusakan tepat waktu. Ketika supervisor menumbuhkan budaya kepemilikan (*ownership*) terhadap fasilitas, maka tingkat kerusakan menurun, umur guna meningkat, dan kualitas layanan belajar membaik.

Tahapan terakhir yaitu Fungsi pengawasan (*controlling*) menautkan supervisi manajerial dengan pengelolaan sarpras melalui monitoring berkala, evaluasi pencapaian standar, serta tindak lanjut perbaikan. Terry menegaskan bahwa *controlling* adalah upaya memastikan tidak ada penyimpangan dari rencana atau norma; di sekolah, norma yang dimaksud antara lain standar yang ditetapkan dalam Permendiknas 24/2007 atau ketentuan terbaru yang mencabut/memperbaruinya.

Pengawasan dilakukan dengan instrumen (checklist kondisi ruang, daftar inventaris, kartu pemeliharaan, laporan kerusakan), kemudian hasilnya dibandingkan dengan kriteria minimum pada lampiran regulasi. Jika ditemukan gap (misal kurangnya perpustakaan, laboratorium yang tidak berfungsi), supervisor menyusun rencana tindak lanjut (RKT, penganggaran, kemitraan) agar penyimpangan dikoreksi. Dalam tataran konseptual, supervisi yang baik akan mengintegrasikan pengawasan akademik dan pengawasan sarpras, karena kualitas pembelajaran tidak dapat dicapai jika lingkungan belajar tidak memenuhi syarat.

Literatur manajemen sarana prasarana menekankan siklus perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, penghapusan, yang semuanya

memerlukan pengendalian mutu pada tiap tahap. Ketika *controlling* dilakukan secara sistematis, sekolah dapat menekan biaya perbaikan darurat (karena kerusakan terdeteksi dini), meningkatkan keselamatan dan kesehatan (ruang berventilasi baik, sanitasi layak), dan menjamin ketersediaan media untuk aktivitas pembelajaran.

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Prof. Sanusi (1991 : 2015) menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian manusia. Pendidikan harus berlandaskan pada nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan. Nilai berfungsi sebagai *driving force* atau kekuatan pendorong dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap aktivitas pendidikan memiliki makna yang lebih mendalam.

Oleh karena itu, supervisi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus berlandaskan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan agar tercipta lingkungan belajar yang bermakna. Dalam konteks penelitian ini, supervisi manajerial Kepala sekolah dalam Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai yang meliputi sebagai berikut.

a. Nilai Teologis

Nilai teologis menekankan hubungan manusia dengan Tuhan. Supervisi manajerial yang berlandaskan nilai teologis akan mendorong kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk bekerja dengan keikhlasan, integritas, serta menjadikan pengelolaan fasilitas sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian. Nilai teologis menekankan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai fondasi transendental dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam praktik pendidikan dan manajemen sekolah. Dalam perspektif

pendidikan, nilai teologis memandang bahwa seluruh aktivitas pendidikan bukan sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral yang mengikat pelakunya pada tanggung jawab yang lebih tinggi, yakni pertanggungjawaban kepada Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan dengan kesadaran etis dan spiritual agar setiap kebijakan dan tindakan memiliki makna yang mendalam.

Konteks supervisi manajerial, nilai teologis berfungsi sebagai landasan batiniah yang menuntun kepala sekolah dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Supervisi manajerial yang berlandaskan nilai teologis mendorong kepala sekolah untuk bekerja dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan integritas, karena pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai pemimpin moral yang menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.

Penerapan nilai teologis dalam supervisi manajerial menumbuhkan kesadaran bahwa pengelolaan fasilitas sekolah merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian. Setiap perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan anggaran, pemeliharaan fasilitas, hingga evaluasi pemanfaatannya dilakukan dengan niat yang lurus dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai teologis ini menjadi benteng moral yang mencegah terjadinya penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakjujuran dalam pengelolaan anggaran, atau pengabaian terhadap tanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana.

Selain itu, supervisi manajerial yang berlandaskan nilai teologis juga berperan dalam membentuk budaya kerja yang berintegritas di lingkungan sekolah. Kepala sekolah melalui keteladanan dan pembinaan menanamkan kesadaran kepada guru dan tenaga kependidikan bahwa setiap fasilitas pendidikan yang ada merupakan titipan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

Dengan pendekatan ini, seluruh warga sekolah terdorong untuk bekerja tidak hanya karena tuntutan tugas, tetapi karena dorongan nurani dan kesadaran spiritual.

Dengan demikian, nilai teologis dalam supervisi manajerial memberikan dimensi makna yang lebih dalam terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Supervisi manajerial tidak lagi dipandang sebagai proses kontrol semata, melainkan sebagai praktik kepemimpinan yang memadukan profesionalisme dengan kesadaran spiritual. Integrasi nilai teologis ini akan mendorong terciptanya tata kelola sarana dan prasarana pendidikan yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pengabdian, sehingga mampu mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang bermakna dan berkarakter.

b. Nilai Logis

Nilai logis berkaitan dengan rasionalitas, objektivitas, dan pemikiran sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen pendidikan, nilai logis menuntut setiap kebijakan dan tindakan didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal, data yang akurat, serta analisis yang terstruktur. Nilai ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan, termasuk supervisi manajerial, tidak boleh dilandasi oleh intuisi semata, kebiasaan lama, atau kepentingan subjektif, tetapi harus bertumpu pada prinsip-prinsip rasional dan ilmiah. Penerapan nilai logis menempatkan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan yang berpikir secara sistematis dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk menggunakan logika dan analisis yang rasional dalam menentukan prioritas pengadaan sarana prasarana, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata sekolah, kondisi fasilitas yang tersedia, serta keterbatasan sumber daya. Keputusan yang diambil tidak didasarkan pada keinginan personal atau tekanan pihak tertentu, melainkan pada analisis kebutuhan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Nilai logis juga tercermin dalam proses penyusunan program supervisi manajerial. Kepala sekolah perlu menyusun program supervisi secara terencana, berurutan, dan terdokumentasi dengan baik. Program supervisi disusun berdasarkan tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta jadwal pelaksanaan yang realistis. Dengan pendekatan logis, supervisi manajerial tidak dilakukan secara sporadis atau insidental, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen sekolah yang berkesinambungan dan dapat dievaluasi. Selain itu, nilai logis memiliki peran penting dalam evaluasi efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah melalui supervisi manajerial harus mampu menilai sejauh mana fasilitas yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mengkaji dampak penggunaan sarana prasarana terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Penilaian semacam ini menuntut kemampuan berpikir analitis dan objektif agar hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan yang tepat.

Berlandaskan nilai logis, supervisi manajerial kepala sekolah menjadi praktik pengelolaan pendidikan yang rasional dan akuntabel. Keputusan-keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional karena didukung oleh data, analisis, dan argumentasi yang jelas. Nilai logis ini juga memperkuat kredibilitas kepemimpinan kepala sekolah, karena setiap kebijakan supervisi manajerial dapat dijelaskan secara terbuka kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan. Nilai logis dalam supervisi manajerial berfungsi sebagai landasan intelektual bagi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Penerapan nilai ini mendorong terciptanya pengelolaan fasilitas sekolah yang efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan tujuan pendidikan. Supervisi manajerial yang didasarkan pada nilai logis akan membantu sekolah mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung proses pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

c. Nilai fisiologis

Nilai fisiologis berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisik, seperti rasa aman, kenyamanan, kesehatan, dan kelayakan lingkungan. Dalam konteks pendidikan, nilai fisiologis memiliki posisi yang sangat fundamental karena proses belajar mengajar hanya dapat berlangsung secara optimal apabila kebutuhan fisik peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan terpenuhi dengan baik. Lingkungan belajar yang tidak aman, tidak nyaman, atau tidak sehat akan menghambat konsentrasi, motivasi, serta efektivitas pembelajaran.

Nilai fisiologis menuntut kepala sekolah untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pendidikan benar-benar mendukung kebutuhan dasar warga sekolah. Supervisi manajerial tidak cukup hanya menilai kelengkapan administrasi fasilitas, tetapi harus mencermati kondisi nyata sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa ruang kelas, fasilitas sanitasi, pencahayaan, ventilasi, serta keamanan bangunan sekolah berada pada kondisi yang layak dan aman untuk digunakan.

Penerapan nilai fisiologis dalam supervisi manajerial juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan keselamatan. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak terawat, rusak, atau tidak sesuai standar dapat menimbulkan risiko fisik bagi peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, supervisi manajerial harus mencakup pemantauan rutin terhadap kondisi fisik fasilitas sekolah, serta penetapan tindak lanjut yang cepat dan tepat apabila ditemukan fasilitas yang membahayakan atau mengganggu kenyamanan belajar. Nilai fisiologis juga menempatkan kenyamanan belajar sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial kepala sekolah. Lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan tertata akan membantu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kepala sekolah melalui supervisi manajerial perlu memastikan bahwa sarana

dan prasarana tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal agar mendukung aktivitas belajar mengajar secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, nilai fisiologis dalam supervisi manajerial berfungsi sebagai dasar humanistik dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Supervisi manajerial yang berlandaskan nilai fisiologis menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas sekolah bukan semata soal efisiensi dan kelengkapan, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai subjek utama pendidikan. Penerapan nilai ini akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan bermakna.

d. Nilai Etik

Nilai etik menekankan pada norma moral, keadilan, dan tanggung jawab. Kepala sekolah dalam supervisi manajerial harus menjunjung tinggi kejujuran dalam pengelolaan anggaran, keadilan dalam distribusi sarana prasarana, serta tanggung jawab dalam pemeliharaan fasilitas.

e. Nilai Estetika

Nilai estetika berkaitan dengan keindahan, keteraturan, dan kenyamanan. Supervisi manajerial harus memperhatikan aspek estetika agar sarana prasarana tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik.

f. Nilai Teleologis

Nilai teleologis berhubungan dengan tujuan akhir atau orientasi hasil. Kepala sekolah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam supervisi manajerial memiliki orientasi pada hasil yang bermakna bagi perkembangan peserta didik dan pencapaian standar nasional pendidikan.

Integrasi nilai-nilai Prof. Sanusi dengan kerangka POAC G. R. Terry memperkuat supervisi manajerial sebagai praktik manajemen pendidikan yang utuh. Perencanaan yang bernilai, pengorganisasian yang adil, pelaksanaan yang bermakna, dan pengawasan yang reflektif membentuk satu kesatuan sistem

supervisi yang manusiawi dan berorientasi mutu. Supervisi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar implementasi teori manajemen, tetapi juga aktualisasi filosofi pendidikan berbasis nilai. Supervisi manajerial yang berlandaskan nilai akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga bermakna secara moral, spiritual, dan humanistik, sebagaimana ditekankan oleh Prof. Sanusi.

Prof. Sanusi menempatkan nilai sebagai inti dari seluruh praktik pendidikan. Ia menegaskan bahwa “pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia yang harus berlandaskan nilai, karena tanpa nilai pendidikan akan kehilangan makna dan arah” (Sanusi, 1991). Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap praktik pendidikan, termasuk supervisi manajerial, tidak boleh dilepaskan dari landasan nilai yang menjiwai tujuan dan prosesnya. Supervisi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan tindakan bermuatan nilai yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan belajar dan perkembangan peserta didik.

Sanusi juga menegaskan bahwa “nilai berfungsi sebagai kekuatan pendorong (driving force) dalam pengambilan keputusan manusia” (Sanusi, 2015). Dalam konteks manajemen pendidikan, nilai menjadi penentu arah kebijakan dan perilaku organisatoris. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai teologis, logis, fisiologis, etik, estetika, dan teleologis ke dalam kerangka manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) menjadi krusial agar supervisi manajerial tidak kehilangan dimensi moral dan kemanusiaannya.

C. Penelitian Terdahulu

Selain landasan kebijakan penelitian yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang secara langsung mengatur peran kepala sekolah sebagai supervisor manajerial khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Rincian kebijakan tersebut meliputi:

- a. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah
- d. Permendikbud nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025
- f. Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Standar Tenaga kependidikan
- g. Program Merdeka Belajar (Kemendikbudristek, 2023-2025)

Ada penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini. Berikut tabelnya di bawah ini.

Table 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Saran dan Rekomendasi
1	Musriadi (2024)	Analisis Pelaksanaan Supervisi Manajerial untuk Meningkatkan Mutu Pengelolaan Sekolah SD Negeri 3 Banda Aceh	Supervisi manajerial pada aspek sarana prasarana belum memberikan dampak optimal karena belum terintegrasi dengan program sekolah dan dinas	Supervisi manajerial perlu dijadikan dasar penyusunan RKAS, RKS, dan perencanaan sarana prasarana
2	Dwi Kurniawati, Mustainah & Hasanuddin (2022)	Implementasi Kebijakan Supervisi Akademik dan Manajerial pada SD Negeri 3 Kota Palu	Supervisi manajerial berkontribusi meningkatkan mutu pengelolaan sekolah termasuk pengelolaan sarana prasarana	Diperlukan peningkatan kompetensi pengawas dan dukungan sumber daya supervisi
3	Ali Zainudin & Badrudin (2023)	Management of Educational Facilities and Infrastructure at the	Pengelolaan sarana prasarana menjadi lebih tertib melalui supervisi yang	Supervisi manajerial perlu dilakukan secara

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Saran dan Rekomendasi
		Bintang Madani Elementary School	dilakukan secara internal dan eksternal	rutin dan berbasis SOP
4	Sri Marmoah, Dhea Adela & Muna Fauziah (2022)	Implementation of Facilities and Infrastructure Management in Public Elementary Schools	Supervisi kepala sekolah berperan penting dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Sekolah disarankan memiliki tenaga khusus pengelola sarana prasarana
5	Rifan Budiyanto, Sri Marmoah & Karsono (2025)	Enhancing Elementary School Management: Evaluation of Facilities and Infrastructure Management with CIPP Model	Pengelolaan sarpras yang disupervisi secara sistematis berdampak positif pada mutu pembelajaran dan motivasi siswa	Supervisi manajerial sebaiknya menggunakan model evaluasi CIPP
6	Nasrudin & Maryadi (2019)	Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD	Supervisi mendukung perencanaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana prasarana secara efektif	Kepala sekolah perlu memperkuat peran supervisi manajerial dalam pengelolaan sarpras
7	Yeni Astuti, Amrulloh K. Ma'arif & Moh. Masrur (2024)	Penerapan Manajemen Sarana dan Prasarana di SD Negeri 2 Srikaton Adiluwih	Pengawasan sarana prasarana meningkatkan efisiensi pemanfaatan fasilitas sekolah	Supervisi manajerial perlu dilakukan secara berkala dan berbasis indikator kinerja
8	Saepul Maulana Zidni Wildani (2024)	Manajemen Sarana dan Prasarana di SDN Pruwatan 05 Bumiayu Brebes	Supervisi manajerial kepala sekolah meningkatkan ketertiban inventaris dan pemanfaatan sarana	Supervisi harus terdokumentasi dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan
9	Sinta Nuria Rahmawati & Arya Setya	Analysis of Facilities and Infrastructure	Supervisi berkontribusi pada efektivitas	Diperlukan kolaborasi antara pengawas, kepala

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Saran dan Rekomendasi
	Nugroho (2024)	Management in Elementary Schools	perencanaan, pemeliharaan, dan inventaris sarpras	sekolah, dan warga sekolah
10	Deden Setiawan (2024)	Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Pengelolaan Sarana Prasarana terhadap Mutu Sekolah Dasar	Kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan sarana prasarana	Supervisi manajerial perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi kepala sekolah

Penelitian yang dilakukan oleh Musriadi (2024) mengkaji pelaksanaan supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pengelolaan sekolah di SD Negeri 3 Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi manajerial pada aspek sarana dan prasarana belum memberikan dampak yang optimal karena belum terintegrasi dengan program sekolah maupun kebijakan dinas pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa supervisi manajerial akan kurang efektif apabila tidak dijadikan bagian dari perencanaan strategis sekolah. Oleh karena itu, Musriadi merekomendasikan agar supervisi manajerial dijadikan dasar dalam penyusunan RKS dan RKAS, khususnya dalam perencanaan sarana dan prasarana sekolah.

Selanjutnya, penelitian oleh Dwi Kurniawati, Mustainah, dan Hasanuddin (2022) menelaah implementasi kebijakan supervisi akademik dan manajerial di SD Negeri 3 Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi manajerial memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pengelolaan sekolah, termasuk dalam aspek pengelolaan sarana dan prasarana. Supervisi yang dilaksanakan secara konsisten mampu meningkatkan keteraturan dan efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kompetensi pengawas serta dukungan sumber daya agar supervisi manajerial dapat berjalan lebih optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Zainudin dan Badrudin (2023) mengangkat tema pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah Dasar Bintang Madani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana menjadi lebih tertib dan terkontrol melalui supervisi yang dilakukan baik secara internal oleh kepala sekolah maupun secara eksternal oleh pihak terkait. Supervisi yang dilakukan secara rutin mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang lebih profesional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar supervisi manajerial dilaksanakan secara rutin dan berbasis pada standar operasional prosedur (SOP).

Penelitian oleh Sri Marmoah, Dhea Adela, dan Muna Fauziah (2022) meneliti implementasi pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dasar negeri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilakukan kepala sekolah mempunyai peran penting dalam proses pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kepala sekolah yang aktif melakukan supervisi mampu mendorong pemanfaatan sarpras secara lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar sekolah memiliki tenaga khusus yang menangani pengelolaan sarana dan prasarana guna mendukung keberlanjutan fungsi supervisi manajerial.

Penelitian oleh Rifan Budiyanto, Sri Marmoah, dan Karsono (2025) menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarpras yang disupervisi secara sistematis memberikan dampak positif terhadap mutu pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik. Supervisi manajerial yang terencana dan berbasis evaluasi mampu meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar supervisi manajerial pengelolaan sarpras menggunakan model evaluasi yang komprehensif seperti CIPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrudin dan Maryadi (2019) membahas manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam proses

pembelajaran di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi berperan penting dalam mendukung perencanaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara efektif. Kepala sekolah yang melaksanakan supervisi manajerial secara konsisten mampu memastikan ketersediaan dan kelayakan sarpras untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penguatan peran supervisi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

Penelitian oleh Yeni Astuti, Amrulloh K. Ma'arif, dan Moh. Masrur (2024) mengkaji penerapan manajemen sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Srikaton Adiluwih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkesinambungan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan fasilitas sekolah. Supervisi manajerial memberikan dampak terhadap optimalisasi penggunaan sarana yang tersedia. Penelitian ini merekomendasikan agar supervisi manajerial dilakukan secara berkala dan berbasis indikator kinerja yang jelas.

Selanjutnya, penelitian oleh Saepul Maulana Zidni Wildani (2024) meneliti manajemen sarana dan prasarana di SDN Pruwatan 05 Bumiayu Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi manajerial kepala sekolah berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban administrasi inventaris dan pemanfaatan sarana prasarana sekolah. Supervisi yang dilakukan secara konsisten mampu mendorong budaya tertib administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar supervisi manajerial didokumentasikan secara sistematis dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Sinta Nuria Rahmawati dan Arya Setya Nugroho (2024) menganalisis pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa supervisi memberikan kontribusi terhadap efektivitas perencanaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarpras. Supervisi yang dilaksanakan secara kolaboratif mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penelitian ini

merekomendasikan adanya kolaborasi yang kuat antara pengawas, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Deden Setiawan (2024) mengkaji pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah dan pengelolaan sarana prasarana terhadap mutu sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan sarpras sekolah. Supervisi manajerial menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar supervisi manajerial lebih difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan, dapat disintesis bahwa supervisi manajerial memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar. Hampir seluruh penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas berkontribusi terhadap keteraturan administrasi, efektivitas pemanfaatan fasilitas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (Nasrudin & Maryadi, 2019; Sri Marmoah dkk., 2022; Ali Zainudin & Badrudin, 2023).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa supervisi manajerial yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis mampu meningkatkan mutu pengelolaan sekolah, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana. Temuan Dwi Kurniawati dkk. (2022), Rifan Budiyanto dkk. (2025), serta Deden Setiawan (2024) memperlihatkan bahwa supervisi manajerial tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan sarpras, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu pembelajaran, motivasi siswa, dan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

Hasil sintesis juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi supervisi manajerial, khususnya terkait aspek perencanaan dan

pengendalian. Penelitian Musriadi (2024) mengungkapkan bahwa supervisi manajerial belum memberikan dampak optimal ketika tidak terintegrasi dengan dokumen perencanaan sekolah seperti RKS dan RKAS. Hal ini menunjukkan bahwa supervisi manajerial masih kerap diposisikan sebagai kegiatan administratif semata, bukan sebagai bagian dari siklus manajemen sekolah yang utuh.

Sisi pelaksanaan supervisi, sebagian besar menekankan pentingnya supervisi yang dilakukan secara rutin, berkelanjutan, dan berbasis standar atau indikator yang jelas (Ali Zainudin & Badrudin, 2023; Yeni Astuti dkk., 2024; Saepul Maulana Zidni Wildani, 2024). Supervisi yang dilakukan secara insidental dan tidak terdokumentasi dengan baik cenderung menghasilkan perbaikan yang bersifat sementara dan kurang berkelanjutan.

Sintesis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan supervisi manajerial. Deden Setiawan (2024) menegaskan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan sarana prasarana. Hal ini diperkuat oleh rekomendasi beberapa penelitian yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas melalui pembinaan dan pendampingan yang terarah (Dwi Kurniawati dkk., 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu juga mengidentifikasi bahwa dukungan sumber daya manusia dan organisasi sangat mempengaruhi efektivitas supervisi manajerial. Keterbatasan jumlah tenaga kependidikan, belum adanya petugas khusus sarana prasarana, serta lemahnya dokumentasi supervisi menjadi kendala yang sering ditemukan (Sri Marmoah dkk., 2022; Wildani, 2024). Oleh karena itu, beberapa peneliti merekomendasikan perlunya pembentukan tim atau tenaga khusus pengelola sarpras serta penguatan kolaborasi antar warga sekolah (Sinta Nuria Rahmawati & Arya Setya Nugroho, 2024).

Secara konseptual, sebagian penelitian telah mengkaji supervisi manajerial menggunakan pendekatan atau model evaluasi tertentu, seperti model CIPP (Budiyanto dkk., 2025). Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengkaji supervisi manajerial pengelolaan sarana prasarana dengan pendekatan fungsi manajemen klasik secara utuh, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sebagaimana dikemukakan oleh G.R. Terry.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas supervisi manajerial dan pengelolaan sarana prasarana, masih terdapat celah penelitian (research gap), yaitu:

1. Belum optimalnya kajian supervisi manajerial yang secara khusus dianalisis menggunakan kerangka fungsi manajemen G.R. Terry (POAC);
2. Masih terbatasnya penelitian studi kasus yang membandingkan implementasi supervisi manajerial pada lebih dari satu sekolah dasar dengan karakteristik yang berbeda;
3. Perlunya kajian yang tidak hanya mendeskripsikan hasil supervisi, tetapi juga menganalisis proses supervisi manajerial secara komprehensif dan kontekstual.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan karena berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji supervisi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar melalui perspektif fungsi manajemen G.R. Terry, pada dua lokus sekolah yang memiliki kondisi dan karakteristik berbeda, yaitu SDN Loa 1 Paseh dan SDN Cibeunying 02 Majalaya Kabupaten Bandung.